

PELUANG EKSPANSI KREDIT PERBANKAN DITINJAU  
DARI SISI LDR DI SULAWESI SELATAN



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. terima	9-3-1998
Asal dari	FAK. EKONOMI
banyaknya	1 (SATU) EKSP
Harga	HADIAH
No. Inventaris	980301676
No. Klas	

OLEH

**WIJAYA TJANDRA**  
90 01 167

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UJUNG PANDANG**  
**1997**

**PELUANG EKSPANSI KREDIT PERBANKAN DITINJAU  
DARI SISI LDR DI SULAWESI SELATAN**

OLEH

**WIJAYA TJANDRA**  
**90 01 167**

*SKRIPSI SARJANA LENGKAP UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN  
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
EKONOMI JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNGPAJANG*

**Disetujui Oleh :**

**PEMBIMBING I**



**( DRS. NUHUN AHMAD, MS )**

**PEMBIMBING II**



**( DRA. NURSINI, MA )**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan Khidayatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan-kekurangan yang dialami, tetapi dengan ketabahan penulis serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat rampung dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Drs. Nuhun Ahmad, MSi.** selaku pembimbing I dan Ibu **Dra. Nursini, MA.** selaku pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga dalam memberikan bantuan, bimbingan, petunjuk serta mengoreksi penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf yang telah turut memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Hasanuddin pada Fakultas Ekonomi.
3. Para dosen yang sudah membantu penulis didalam memberikan pengajaran selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

4. Para staf administrasi Fakultas Ekonomi yang berupaya mengurus kelancaran studi dan penyelesaian studi bagi mahasiswa.
5. Bapak pimpinan Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang, bapak Kepala Biro Pusat Statistik Wil. Ujung Pandang beserta seluruh staf yang telah memberikan fasilitas dan bantuan dalam memperoleh data yang dibutuhkan.
7. Kedua orang tua penulis yang tercinta yang telah mendidik dan mendorong serta membiayai penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan hingga pada penyelesaian studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga hasil penulisan skripsi ini nantinya dapat memberikan sumbangan dan pikiran yang positif bagi pembaca sekalian, Amin.

Ujung Pandang, Januari 1998

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	5
1.4. Hipotesis Kerja .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Teori Perkreditan.....	7
2.1.1. Pengertian Kredit .....	7
2.1.2. Unsur-unsur Kredit .....	8
2.1.3. Tujuan Kredit .....	11
2.1.4. Fungsi Kredit .....	15
2.1.5. Jenis-jenis Kredit .....	16
2.1.6. Kriteria Penilaian Pemberian Kredit .....	21
2.2. Sumber Dana Bank .....	26
2.2.1. Pengertian Sumber Dana Bank .....	26
2.2.2. Jenis-jenis Sumber Dana Perbankan.....	26
2.2.3. Giro (Demand Deposits) .....	29
2.2.4. Deposito (Time Deposits) .....	31
2.2.5. Tabungan (Saving) .....	32
2.3. Modal .....	34
2.3.1. Fungsi Modal .....	34
2.3.2. Pengertian Modal .....	35
2.4. Pengertian LDR .....	39
2.5. Peluang Ekspansi Kredit Perbankan .....	40
2.5.1. Pengertian Peluang .....	40
2.5.2. Ekspansi Kredit Perbankan .....	41
<b>BAB III : METODOLOGI</b>	
3.1. Kerangka Konseptual .....	43
3.2. Metode Penelitian .....	44
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	44
3.4. Metode Analisis .....	45
3.5. Sistematika Penulisan .....	47

<b>BAB IV : SUMBER DANA DAN EKSPANSI KREDIT PERBANKAN DI SULAWESI SELATAN</b>	
4.1. Perkembangan Perbankan di Sul-Sel.....	48
4.2. Perkembangan Sumber Dana Perbankan di Sul-Sel ....	53
4.3. Ekspansi Kredit Perbankan Menurut Jenis dan Sektor Ekonomi .....	58
<b>BAB V : LDR PERBANKAN DI SULAWESI SELATAN .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB VI : P E N U T U P</b>	
6.1. Kesimpulan .....	75
6.2. Saran-saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IV.1. Jumlah Bank dan Kantor Bank di Sulawesi Selatan .....	51
Tabel IV.2. Perkembangan Dana Masyarakat di Sulawesi Selatan .....	54
Tabel IV.3. Pertumbuhan Giro, Deposito, dan Tabungan di Sulawesi Selatan.....	56
Tabel IV.4. Pertumbuhan Dana Masyarakat di Sulawesi Selatan .....	57
Tabel IV.5. Perkembangan Dana Perbankan di Sulawesi Selatan .....	58
Tabel IV.6. Pertumbuhan Kredit Perbankan di Sulawesi Selatan.....	61
Tabel IV.7. Penyaluran Kredit Perbankan di Sulawesi Selatan Menurut Bank.....	62
Tabel IV.8. Penyaluran Kredit Perbankan di Sulawesi Selatan Menurut Jenis (milliar Rp) .....	64
Tabel IV.9. Proporsi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi di Sulawesi Selatan .....	65
Tabel IV.10. Penyaluran Kredit Perbankan di Sulawesi Selatan Menurut Sektor (juta Rp) .....	66
Tabel V.1. LDR Perbankan di Sulawesi Selatan (milliar Rp).....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekspansi kredit perbankan sepanjang tahun 1990 merupakan yang paling luar biasa, sesuai dengan target pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Memasuki tahun 1991, setelah dikeluarkannya Paket Kebijakan 28 Pebruari 1991, ekspansi mulai berkurang namun masih tinggi.

Kebijakan pemerintah di bidang perkreditan diarahkan kepada penyaluran dana-dana masyarakat seoptimal mungkin antara lain untuk kegiatan investasi yang produktif, untuk mendorong ekspor, dan untuk mengembangkan golongan ekonomi lemah, melalui lembaga keuangan dan perbankan yang semakin dimantapkan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan sistem keuangan dan perbankan modern.

Paket Kebijakan 29 Januari 1990 yang disempurnakan dengan Paket Kebijakan 28 Januari 1991, dimaksudkan untuk lebih memantapkan fungsi perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola dana dan pelaksana sistem perkreditan. Paket kebijakan 28 Pebruari 1991 (paktri 28) memuat ketentuan-ketentuan tentang pengawasan dan pembinaan bank termasuk didalamnya penyempurnaan ketentuan perkreditan.

Dalam Paktri 28 terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan pengelola-



an bank secara berhati-hati menyangkut masalah permodalan bank, di mana CAR (Capital Adequacy Ratio) secara bertahap harus menyesuaikan dengan standar modal BIS (Bank For International Settlements) sebesar 8% dengan jadwal sampai 31 maret 1991 sebesar 3%, sampai 31 Maret 1992 sebesar 5%, sampai 31 Maret 1993 sebesar 7% dan sampai 31 Desember 1993 sebesar 8%.

Guna memenuhi ketentuan tentang CAR yang ditetapkan oleh BSI, maka Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank (Capital Adequacy Ratio = CAR) dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991.

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank serta upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagaimana layaknya sebuah badan usaha, maka modal bank harus dapat juga digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya resiko kerugian sebagai akibat dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya berasal sebagian dari dana pihak ketiga atau masyarakat.

CAR dan LDR merupakan faktor yang menentukan dalam penilaian kesehatan perbankan. Bank-bank diharuskan menambah modalnya untuk memenuhi ketentuan CAR sebesar 8 % sampai batas waktu 31 Desember 1993 dan LDR harus berada dalam batas yang aman bagi perbankan.

Ketentuan Bank Indonesia mengenai LDR, yaitu batas minimum 85% dan maksimum 110% Sebelum adanya ketentuan tersebut, LDR sangat

bervariasi, ada yang dibawah 85% seperti: BPD, bank-bank yang naik status, dan bank-bank baru. Untuk bank negara, bank asing, joint ventura baru, dan bank devisa rata-rata LDRnya tertinggi adalah kelompok bank yang merupakan joint ventura baru. Hal ini disebabkan karena bank tersebut memiliki dukungan yang kuat dari kantor pusat di luar negeri.

Pada tahun 1992, ekspansi kredit sangat menurun. Peningkatan kredit perbankan jauh dibawah kenaikan dana perbankan. Penyaluran dana perbankan dalam bentuk kredit kepada dunia usaha tidak begitu lancar karena adanya keengganan bank untuk meningkatkan dan memperluas kredit. Rendahnya kenaikan penghimpunan dana perbankan menyebabkan dana yang di salurkan melalui kredit peningkatannya relatif kecil, disamping besarnya resiko pinjaman dalam kondisi uang ketat.

Dalam APBN 1993/1994 kredit perbankan ditargetkan akan meningkat sebesar 17% sehingga mampu mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dana dapat mempertahankan stabilitas ekonomi. Oleh sebab itu, maka pemberian kredit perbankan yang penting bagi sektor dunia usaha perlu didorong peningkatannya.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan 29 Mei 1993 agar dapat meningkatkan dan memperlancar ekspansi kredit perbankan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi pengaruh berbagai faktor penyebab rendahnya ekspansi kredit selama ini. Dengan demikian ekspansi kredit perbankan di tahun mendatang diperkirakan akan lebih besar dari

ekspansi tahun sebelumnya.

Kebijaksanaan 29 Mei 1993 merupakan perbaikan atas ketentuan-ketentuan prudential banking dan kredit selektif yang dilaksanakan sejak bulan Pebruari 1991.

Penyempurnaan yang dilakukan oleh bank Indonesia, antara lain ketentuan mengenai capital Adequacy Ratio (CAR) diperlonggar dengan mengizinkan bank-bank untuk memperhitungkan seluruh laba tahun lalu sebagai komponen modal (ketentuan lama hanya 10%), mengurangi bobot resiko kredit kepada BUMN, dan fasilitas kredit yang belum di gunakan dari 100% menjadi 50%. Dengan demikian CAR bank-bank akan meningkat, sehingga membari ruang gerak yang lebih luas untuk meningkatkan kreditnya.

Dalam penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan penyempurnaan, seperti Loan to Deposit Ratio (LDR).

Pengertian deposito di perluas, tidak hanya mencakup dana pihak ketiga tetapi juga modal sendiri, dan cara pemberian nilai atas pelanggaran LDR disederhanakan.

Dengan adanya ketentuan bank Indonesia mengenai batas LDR dan juga dengan adanya ketentuan baru yakni kebijaksanaan 29 Mei 1993, akan mempengaruhi ekspansi kredit. Oleh karena itu, perlu diamati bagaimana ekspansi kredit di Sulawesi Selatan dengan adanya kedua kebijaksanaan tersebut. Apakah masih ada peluang untuk ekspansi, jika hal ini ditinjau dari sisi LDR perbankan?

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dipilih judul "PELUANG EKSPANSI KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI SISI LDR DI SULAWESI SELATAN".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah penulis mengemukakan pokok permasalahan, yaitu :

"Seberapa besar peluang ekspansi kredit perbankan ditinjau dari sisi LDR di Sulawesi Selatan".

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui peluang ekspansi kredit perbankan ditinjau dari sisi LDR di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui implikasi kebijaksanaan yang telah ditempuh pemerintah dalam hubungannya dengan peraturan mengenai LDR.

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui dan membuktikan teori-teori moneter yang ada.
2. Untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memecahkan masalah-masalah mengenai ekspansi kredit perbankan.
3. Untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan bacaan bagi yang

berminat dalam bidang moneter.

#### **1.4 Hipotesis**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis kemukakan dan melihat tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini serta berlandaskan kerangka teori yang ada, penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut :

"Jika ditinjau dari sisi LDR, maka peluang untuk ekspansi kredit perbankan di Sulawesi-Selatan cukup besar".

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Perkreditan**

##### **2.1.1 Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberi kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa (Suyatno, dkk, 1993: 12).

Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking*, mengatakan bahwa: "kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang".

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam

bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit (Suyatno dkk, 1993: 13).

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang sementara tidak dipergunakan untuk tujuan produktif oleh pemilik dana, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat (debitur) untuk jangka waktu tertentu. Sehingga dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap saat dapat diuangkan.

Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun, tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek dalam pasar uang.

Dalam usaha menghimpun dana tersebut, sudah barang tentu bank harus mengetahui sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Dalam garis besarnya sumber dana bagi sebuah bank ada tiga, (Thomas Suyatno, 1994 ; 29-31) yaitu :

a. Dana yang bersumber dari bank sendiri, baik berupa modal setor para

pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas, umumnya berbentuk simpanan dalam bentuk giro (demand deposit), deposito (time deposit) dan tabungan (saving).
- c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank.

Bagi dunia usaha kredit merupakan sesuatu yang tidak asing lagi dan sangat penting bagi kelangsungan usahanya. Dana yang mereka butuhkan tidak selamanya perusahaan memenuhinya, sehingga dibutuhkan kredit dari pihak perbankan dalam mendukung kegiatan usahanya.

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967, mengemukakan bahwa :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan".

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa seseorang atau perusahaan yang telah mendapat kredit dari pihak perbankan berarti seseorang atau perusahaan tersebut telah mendapat kepercayaan.



### 2.1.2 Unsur-unsur Kredit

Telah dikatakan di atas bahwa atas dasar kepercayaanlah, suatu lembaga kredit/perbankan memberikan kredit. Setelah yakin bahwa kredit dapat dikembalikan, barulah kredit dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kedua pihak. Jika tidak demikian, dana yang dimiliki perbankan yang dihimpun dari masyarakat tidak akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak peminjam.

Dengan demikian menurut Thomas Suyatno dkk, dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

- a. Kepercayaan
- b. Waktu
- c. Degree of risk (tingkat resiko)
- d. Objek kredit

Kredit diberikan oleh perbankan, jika yakin bahwa kredit tersebut baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu.

Unsur waktu dalam kredit adalah masa antara pemberian dan pengembalian kredit, di mana nilai uang yang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan datang. Makin lama waktunya, makin besar perbedaan nilai uangnya.

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pengembaliannya

tingkat risikonya. Karena masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan.

Objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Keempat unsur kredit tersebut harus diperhatikan dalam pemberian kredit. Juga dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan kredit, terlebih lagi jika dalam jumlah yang besar, karena pemberian kredit dalam jumlah yang besar mempunyai resiko kemungkinan macet dalam jumlah yang besar pula. Banyaknya kredit macet dapat mempengaruhi pemberian kredit di masa mendatang, sehingga dapat pula mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.3 Tujuan Kredit**

Tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Namun demikian tujuan kredit tidak lepas dari falsafah yang dianut oleh suatu negara.

Oleh karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika betul-betul merasa yakin bahwa nasabah

nasabahnya dalam bentuk kredit, jika betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, terdapat unsur keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan. Keamanan yang dimaksud adalah bahwa kredit yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan. Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang diterima dalam bentuk bunga (Suyatno dkk, 1993: 15).

Jika perbankan tidak yakin akan keamanan kredit yang diberikan dan juga tidak yakin dapat memperoleh keuntungan dari pemberian kredit tersebut, maka kegiatan pemberian kredit tidak akan dilakukan.

Menurut Thomas Suyatno dkk, dalam bukunya Dasar-dasar Perkredit-an, menyatakan bahwa :

"Karena Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Suyatno dkk, 1993: 15)".

Untuk itu, bagi perbankan dalam memberikan kredit hendaknya tidak bertentangan dengan Pancasila dan juga mengutamakan kepentingan umum

Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank adalah untuk :

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya (Suyatno dkk, 1993: 15).

Dapat dilihat bahwa jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka perusahaan tersebut dapat maju dan berkembang. Dengan demikian dapat pula meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi sangat diharapkan perbankan dapat memberikan kredit untuk menunjang peningkatan kegiatan ekonomi.

Dari tujuan tersebut, terdapat adanya kepentingan yang seimbang antara:

1. Kepentingan pemerintah
2. Kepentingan masyarakat
3. Kepentingan pemilik modal (Suyatno dkk, 1993: 15).

Dalam tujuan kredit terdapat kepentingan pemerintah dalam hal meningkatkan kegiatan ekonomi untuk menunjang pembangunan, kepentingan masyarakat dalam hal jika perekonomian meningkat, berarti kehidupan masyarakat juga turut meningkat, dan kepentingan pemilik modal dalam hal pemilikan modal dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit yang dapat

digunakan untuk meningkatkan usahanya.

Kebijakan kredit perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi.
- b. Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan.
- c. Bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan bank abilitynya.
- d. Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit. Di sini tersirat pertimbangan yuridis dari revenue (penghasilan pemerintah dengan adanya bea meterai kredit).
- e. Overdraft (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau melebihi plafon kredit yang disetujui) dilarang.
- f. Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang (kredit untuk membayar pajak dan bea cukai).
- g. Kredit tanpa jaminan dilarang (Suyatno dkk, 1993: 15 - 16).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan kredit perbankan tersebut, dengan tujuan agar kegiatan perbankan dalam hal pemberian kredit tidak mengganggu kestabilan ekonomi. Jika tidak dikeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut, maka perbankan dapat seenaknya melakukan pemberian kredit yang dapat merugikan nasabah juga perbankan sendiri dan pada akhirnya dapat

mengakibatkan kegiatan ekonomi terganggu.

Setiap bank harus mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut, karena jika tidak bank tersebut akan mengalami kesulitan-kesulitan, salah satunya yaitu timbulnya kredit macet.

Kebijakan tersebut juga untuk menjaga agar kredit perbankan dapat stabil yang memungkinkan LDR perbankan berada dalam batas yang wajar dan tidak mengandung resiko yang besar.

#### **2.1.4 Fungsi Kredit**

Kredit perbankan mempunyai banyak fungsi, antara lain fungsi yang berhubungan dengan perusahaan, kegiatan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan yang berhubungan dengan luar negeri.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain :

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional (Suyatno dkk, 1993: 16-17).

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat dan kurang stabil, kredit dapat berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi melalui usaha-usaha pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Dengan kredit, uang yang mengendap dapat digunakan untuk pembelian barang, untuk berusaha, dan untuk meningkatkan pendapatan, sehingga daya guna uang tersebut meningkat dan peredaran uang menjadi lancar.

### **2.1.5 Jenis-jenis Kredit**

Jenis-jenis kredit terbagi dalam dua bagian yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia dan kredit yang diberikan perbankan untuk masyarakat.

#### **A. Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia**

##### **1. Kredit Langsung**

Kredit langsung adalah kredit yang diberikan secara langsung kepada pihak ketiga bukan bank seperti Pertamina, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jawatan Pegadaian, Perum Peruri, dan usaha lainnya (Suyatno dkk, 1993: 19).

Kredit langsung yang diberikan oleh bank Indonesia lebih bersifat bantuan untuk menunjang pembangunan yang dapat meningkatkan perekonomian secara umum.

Kredit langsung hanya diberikan kepada lembaga/jawatan yang usaha/kegiatan menyangkut kepentingan umum.

## 2. Kredit Likuiditas

Kredit likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Kredit likuiditas dibagi dalam dua golongan, yaitu:

- a. Kredit likuiditas gadai ulang.
- b. Kredit likuiditas darurat, dibedakan dalam dua jenis yakni :
  - Kredit likuiditas darurat umum
  - Kredit likuiditas darurat khusus (Suyatno dkk, 1993: 19-20).

Kredit likuiditas gadai ulang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank agar dapat memperluas pemberian kreditnya. Sebagai jaminannya oleh bank-bank tersebut diberikan jaminan barang-barang para debitur dengan persetujuan yang bersangkutan. Kredit likuiditas darurat umum diberikan kepada bank yang tiba-tiba menghadapi kesulitan likuiditas karena terjadi perubahan secara mendadak. Sedangkan kredit likuiditas darurat khusus diberikan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas, bisa dikarenakan pengembalian kreditnya tidak lancar, sehingga mengganggu likuiditas bank tersebut.

## 3. Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto digolongkan dalam dua jenis, yakni:

- a. Diskonto I merupakan salah satu alat pengendali moneter Bank Sentral.



Penyediaannya bersifat otomatis, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Bank atau LKBB untuk memperlancar pengatur dananya sehari-hari.

- b. Diskonto II disediakan untuk memudahkan bank atau LKBB dalam menanggulangi kesulitan pendanaan karena rencana pengalihan dana tidak sesuai dengan penarikan kredit jangka menengah dan panjang oleh nasabah (Suyatno dkk, 1993 : 19-25).

Fasilitas diskonto hanya dapat dimanfaatkan oleh bank-bank sebagai upaya terakhir dan merupakan bantuan dari Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Fasilitas diskonto diberikan Bank Indonesia dalam bentuk penyediaan dana jangka pendek.

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan likuiditas, bank tersebut dapat membeli promes (surat sanggup) yang diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto.

Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas dan fasilitas diskonto kepada bank-bank yang membutuhkan dalam mengatasi masalah likuiditasnya ataupun masalah kreditnya yang pengembaliannya tidak lancar, karena jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ekonomi.

### **B. Jenis-jenis Kredit Perbankan Untuk Masyarakat**

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :

1. Kredit Dilihat dari Sudut Tujuannya

- a. Kredit konsumtif
- b. Kredit produktif
- c. Kredit perdagangan:
  - Perdagangan dalam negeri
  - Kredit perdagangan luar negeri (Suyatno dkk, 1993: 25).

Kredit perbankan, oleh bank Indonesia dikelompokkan menurut jenisnya, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja dipakai untuk kepentingan jangka panjang, sedangkan kredit konsumsi untuk memperlancar proses konsumsi.

## 2. Kredit dilihat dari Sudut Jangka Waktunya

- a. Kredit Jangka Pendek (Short Term Loan), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
- b. Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan), yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
- c. Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun (Suyatno dkk, 1993: 25 - 27).

Kredit jangka menengah diberikan untuk modal kerja, sedangkan kredit jangka panjang umumnya bertujuan untuk menambah investasi perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.

### 3. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya

- a. Kredit tanpa jaminan (Unsecured Loan)
- b. Kredit dengan jaminan (Secured Loan)

Menurut ketentuan perbankan di Indonesia, bank-bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, baik jaminan berupa barang, jaminan pribadi, ataupun jaminan berupa efek-efek.

### 4. Kredit Dilihat dari Sudut Penggunaannya

- a. Kredit Eksploitasi, adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
- b. Kredit Investasi, adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal (Suyatno dkk, 1993: 25 - 29)

Semua jenis kredit perbankan yang diberikan untuk masyarakat sangat bermanfaat untuk membiayai kegiatan perusahaan dan kemajuan usaha.

Dari jenis-jenis kredit perbankan untuk masyarakat, oleh Bank Indonesia dibagi menurut jenis dan sektor. Ini dapat dilihat pada data kredit perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terbagi menurut jenis dan sektornya.

Menurut sektornya, kredit perbankan dibagi dalam sektor pertanian,

pertambangan, perindustrian, perdagangan, konstruksi, angkutan, jasa-jasa dan lain-lain.

Jadi untuk melihat besarnya kredit perbankan yang diberikan/dialurkan dapat dilihat pada data penyaluran kredit perbankan menurut jenis dan sektornya.

### **2.1.6 Kriteria Penilaian Pemberian Kredit**

Oleh karena dana yang digunakan untuk pemberian kredit sebagian besar adalah milik masyarakat dan pemberian kredit selalu mengandung resiko, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian atas permintaan kredit yang diajukan calon nasabah. Tujuan diadakannya penilaian kredit adalah agar kredit yang akan diberikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Keamanan kredit (*safety*), artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.
- b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*suitability*), yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- c. Menguntungkan (*profitable*), baik bagi bank sendiri berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha.

Penilaian kredit yang demikian hanya mungkin dilakukan apabila ter-

Penilaian kredit yang demikian hanya mungkin dilakukan apabila tersedia informasi dan data yang cukup, sehingga dapat diteliti kemampuan manajemen, likuiditas, efektivitas, rentabilitas, dan sebagainya.

Dalam penilaian suatu kredit dimaksudkan untuk mengetahui sampai berapa jauh permintaan kredit dapat dipercaya. Ada beberapa faktor risiko penting yang mempengaruhi penilaian kredit yang lazim dikenal sebagai "the five C's of credit", yakni :

1. Character (kepribadian atau watak),
2. Capacity (kemampuan atau kesanggupan),
3. Capital (modal atau kekayaan),
4. Condition (persyaratan),
5. Collateral (jaminan).

#### *ad.1. Character (kepribadian atau watak)*

Sifat pribadi termasuk perilaku pemohon kredit perlu dibahas dan diteliti secara hati-hati. Riwayat pemohon diselidiki dengan seksama, apakah ia memenuhi kewajiban-kewajibannya dimasa lalu dengan jujur dan baik, kecenderungannya untuk terlibat dalam tuntutan jenis apapun mengenai ganti kerugian, keadaan keluarga, kebiasaan dan sifat-sifat dalam pergaulan adalah hal-hal yang mempengaruhi kesediaannya untuk membayar kembali kredit yang akan diperolehnya. Seseorang yang hanya membayar hutangnya apabila dipaksa oleh pengadilan sudah tentu tidak akan diberi kredit, walaupun ia cukup

kaya. Terhadap badan usaha ekonomi atau badan hukum, yang dinilai adalah orang-orang yang mengendalikan perusahaan yang bersangkutan dan apakah ada kerjasama yang kompak antara mereka tanpa sengketa apa pun. Resiko yang diperkirakan dari faktor "character" adalah "moral fisik".

#### *ad.2. Capacity (kemampuan atau kesanggupan)*

Yaitu kemampuan riil untuk membuat rencana dan mewujudkan menjadi realitas. Hal ini menyangkut dua hal, yaitu :

- a. "Managerial capacity", yaitu kemampuan mengelola perusahaan dengan baik sehingga bisa berkembang.
- b. "Capacity to repay", yaitu kemampuan untuk melunasi kredit yang diajukan, yang pada dasarnya tergantung dari 4 (empat) aspek, yakni :
  1. Aspek pembelanjaan operasi perusahaan, yaitu bagaimana pembelanjaan operasi perusahaan dilakukan.
  2. Aspek likuiditas, yaitu penilaian untuk melihat apakah nasabah mampu melunasi kreditnya pada waktu yang ditentukan.
  3. Aspek aktivitas, yaitu penilaian untuk melihat apakah dengan kredit yang akan diberikan nasabah mampu meningkatkan aktivitas dengan cara lebih efisien.
  4. Aspek rentabilitas, yakni penilaian untuk melihat apakah usaha yang dibiayai mampu menghasilkan laba, sebab laba merupakan sumber pelunasan yang sangat penting.

### *ad.3. Capital (modal atau kekayaan)*

Yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan. Penilaian ini penting mengingat kredit hanya sebagai tambahan pembiayaan dan tidak membiayai sepenuhnya modal yang diperlukan nasabah. Dengan demikian dimaksudkan agar nasabah akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya karena turut menanggung risiko terhadap kegagalan usahanya. Seorang kreditur akan meneliti dengan seksama nilai dan sifat kekayaan peminjam. Dalam penilaian itu yang diutamakan ialah sejauh mana kekayaan itu dapat diuangkan dengan mudah dan cepat tanpa kehilangan nilainya. Dengan kata lain, diutamakan penilaian stabilitas likuiditas dari kekayaan tersebut kekayaan yang mempunyai stabilitas dan likuiditas yang tinggi akan lebih mudah memperoleh kredit dibanding kekayaan yang kurang mempunyai stabilitas dan likuiditas. Risiko sehubungan dengan "capital" dinamakan "financial risk".

### *ad.4. Condition (persyaratan)*

Umumnya adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi, baik regional, nasional maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah, demi keamanan kredit itu sendiri. Kondisi-kondisi yang perlu disoroti dan harus selalu mendapat perhatian bank adalah yang mempengaruhi :

(i) Pemasaran, seperti perkiraan kebutuhan, daya beli, luar pasar, perubahan mode, bentuk persaingan dsb. (ii) Teknik produksi, seperti perkembangan

teknologi, tersedianya bahan baku, bahan pembantu, dsb. (iii) Permodalan, seperti adanya pasar uang dan modal, kredit penjualan, perubahan suku bunga, dsb. (iv) Peraturan/perundangan-undangan yang berhubungan dengan perusahaan nasabah.

#### *ad.5. Collateral (jaminan)*

Istilah collateral ini berarti "jaminan tambahan" karena jaminan utama adalah pribadi yang dinilai bonafiditas dan solidaritasnya. Dengan demikian collateral adalah "the last defence" bagi keselamatan kredit dan terdiri atas barang-barang bergerak maupun tidak, yang secara yuridis dapat dikat sebagai tanggungan. Pada dasarnya jaminan yang cukup tidak menjadi dasar utama menentukan bisa tidaknya kredit tersebut disetujui. Bila melalui penilaian ke 4-C yang lain usaha calon debitur tersebut cukup "feasible", maka kredit dapat diberikan. Jaminan tersebut fungsinya hanya untuk mengkompensir risiko bank apabila nasabah tidak melunasi hutangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk peningkatan barang-barang tanggungan harus diketahui secara pasti status hak milik atas barang-barang yang bersangkutan dan tidak terikat pada pihak lain. Keterangan tanda milik yang asli dan sah harus dipegang oleh bank. Penaksiran harus dibuat secara obyektif dan jujur.



## **2.2 Sumber Dana Bank**

### **2.2.1 Pengertian Sumber Dana Bank**

Dana merupakan hal yang utama bagi lembaga keuangan, tanpa dana bank tidak dapat berfungsi sama sekali.

Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank atau pun aktiva lancar yang dikuasai oleh bank dan setiap waktu dapat diuangkan (Sinungan, 1993: 84).

Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari uang pihak lain yang dititipkan pada bank dan sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan diambil kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

Kegiatan perbankan yang utama adalah mengumpulkan atau meng-himpun dana dalam berbagai pihak untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Jadi jika tidak ada sumber dananya, perbankan tidak dapat memberikan kredit.

### **2.2.2 Jenis-jenis Sumber Dana Perbankan**

Sumber dana perbankan berasal dari berbagai pihak, yaitu sumber dana dari modal sendiri, sumber dana dari dana pinjaman pihak luar, dan sumber dana dari masyarakat.

Menurut Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dana Bank menyatakan bahwa : dana-dana bank yang digunakan

sebagai modal operasional bersumber dari:

a. Dana dari modal sendiri (dana dari pihak I)

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Dalam neraca bank, dana sendiri ini tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada pasiva (liabilities).

Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Modal yang disetor
2. Cadangan-cadangan
3. Laba yang ditahan atau retained earnings (Sinungan, 1993: 85).

Besarnya modal yang disetor merupakan besarnya saham yang dimiliki para pemegang saham. Umumnya modal setoran pertama dari para pemilik bank ini sebagian dipergunakan untuk sarana perkantoran, peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

Cadangan modal merupakan sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan jika timbul resiko.

Laba yang ditahan adalah seharusnya milik para pemegang saham, tetapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.

Biasanya digunakan untuk memperkuat posisi cash reserve atau untuk tambahan loanable funds.

Dalam perhitungan LDR perbankan, dana pihak I yang terdiri modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba yang ditahan juga dimasukkan sebagai unsur pembagi.

b. Dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak II)

Dana dari pihak kedua ini, yaitu pinjaman dana yang diberikan pada bank yang berasal dari:

1. Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan call money dan overnight call money.
2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri.
3. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank.
4. Pinjaman dari Bank Sentral, yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas (Sinungan, 1993: 86).

Dana pihak II merupakan pinjaman dana yang diberikan bank-bank lain, bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, lembaga keuangan bukan bank, atau Bank Sentral. Dana pihak II hanya sewaktu-waktu dibutuhkan, dalam keadaan tertentu, barulah dana pihak ini dibutuhkan.

c. Dana dari masyarakat (dana dari pihak III)

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Giro (Demand Deposits)

## 2. Deposito (Time Deposits)

### 3. Tabungan (Saving) (Sinungan, 1993, 87 - 88).

Selain itu, masih ada beberapa macam dana pihak ketiga lainnya yang diterima bank. Tetapi dana-dana tersebut sebagian besar berbentuk dana sementara yang sukar disusun perencanaannya, misalnya setoran jaminan yaitu dana untuk setoran jaminan L/C (dalam dan luar negeri) dan untuk jaminan bank. Dana-dana ini bersifat sementara saja dan pada saatnya tidak lagi berada pada bank. Yang juga termasuk kategori dana pihak ketiga lainnya adalah sertifikat bank yang dapat diperdagangkan dalam pasar uang.

Dari ketiga sumber dana perbankan tersebut, dana pihak III atau dana yang berasal dari masyarakat yang paling menentukan dalam perhitungan LDR perbankan, karena dana pihak I yang terdiri dari giro, deposito, dan tabungan merupakan pembagi dalam perhitungan LDR. Jadi besar kecilnya LDR, selain ditentukan oleh kredit juga ditentukan oleh besar kecilnya giro, deposito, dan tabungan.

Untuk saat sekarang ini, perbankan menggiatkan kegiatan penghimpun dana, khususnya penghimpun dana yang berasal dari masyarakat. Semakin banyak dana yang dihimpun, maka semakin banyak kredit yang dapat disalurkan yang dapat memberikan keuntungan.

### 2.2.3 Giro (Demand Deposits)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya

dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan buku.

Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut rekening koran. Rekening ini digunakan juga untuk menatausahakan kredit yang diberikan melalui rekening koran. Rekening atas nama nasabah dibagi dalam dua golongan, yaitu Rekening perorangan dan Rekening Atas Nama Suatu Badan (Sinungan, 1993: 88).

Perkembangan rekening giro pada bank tidak hanya berdasarkan kepentingan bank saja, tetapi juga kepentingan masyarakat modern, karena giro adalah uang giral yang juga dipergunakan sebagai alat pembayaran, yaitu melalui penggunaan cek, mempunyai rekening giro pada bank sudah merupakan kebutuhan mutlak demi kelancaran berbagai urusan bisnis dan urusan pembayaran.

Dana giro merupakan dana besar yang termurah. Pertambahan dana dari rekening giro akan menambah kemampuan loanable funds (dana yang dapat dijadikan kredit/pinjaman), sehingga secara berganda akan terjadi lagi penciptaan uang oleh bank melalui rekening koran.

Pada awalnya, yaitu sekitar tahun 1983 - 1986, giro merupakan dana masyarakat yang paling banyak yang dapat dihimpun perbankan. Namun di tahun-tahun berikutnya jumlah giro semakin berkurang, karena masyarakat lebih memilih menyimpan dananya di bank dalam bentuk deposito atau

tabungan yang menjanjikan hasil yang besar dari tingkat tabungan yang tinggi.

Masyarakat menyimpan dananya dalam giro hanya secukupnya saja yang penting dapat memperlancar kegiatan usahanya.

#### **2.2.4 Deposito (Time Deposits)**

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan (Sinungan, 1993: 90).

Berdasarkan suatu jangka waktu tertentu di mana dana mengendap, bank akan mempunyai suatu jangka waktu yang cukup lama menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi jangka pendek yang menghasilkan. Kepastian dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank adalah karena ada jangka waktu tertentu yang meyakinkan bank, bahwa dana itu tidak ditarik, kecuali pada saat jatuh tempo.

Berbeda dengan giro, dana deposito akan mengendap di bank, karena para pemegangnya (deposan) tertarik dengan tawaran bunga yang diajukan bank, di samping keyakinan para deposan bahwa pada saat jatuh tempo, bila tidak ingin memperpanjang, dana tersebut tersedia kembali.

Dana yang berasal dari deposito adalah dana termahal yang harus dipikul bank, yaitu berkisar antara 15% sampai dengan 20% setahun (Sinungan, 1993: 90).

Namun demikian, walaupun deposito merupakan dana yang termahal bagi perbankan karena tingkat suku bunganya yang tinggi, tetapi merupakan dana yang paling aman yang dapat dihimpun perbankan, karena jatuh tempornya dapat diketahui.

Deposito berjangka ada dua macam yang perbedaannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Deposito berjangka inpres, yaitu deposito berjangka yang disimpan pada bank-bank umum milik negara dan bank pembangunan milik negara.
- b. Deposito berjangka lainnya, termasuk dalam kategori ini adalah deposito pada bank umum swasta nasional dan sebagainya (Sinungan, 1990: 90).

Deposito berjangka diterbitkan atas nama (on name) dari masing-masing pemegang, baik perorangan, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Bunga deposito dibayar tiap-tiap bulan dan tingkat suku bunganya ditetapkan oleh masing-masing bank berdasarkan pasaran harga uang yang berlaku.

Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan masyarakat lebih banyak memilih menyimpan dananya di bank dalam bentuk deposito.

### **2.2.5 Tabungan (Saving)**

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Ada empat macam tabungan yang diselenggarakan bank, yaitu Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH), Tabungan Asuransi Berjangka

(Taska), dan tabungan lainnya.

Keempat jenis tabungan ini adalah sebagai berikut:

a. Tabanas ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan.

Tabanas tersebut terdiri atas:

- Tabanas Umum
- Tabungan Pemuda, Pelajar, dan Pramuka (Tappelpram)
- Tabungan Pegawai.

b. Taska, yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

c. Tabungan ONH, yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan.

d. Tabungan lainnya, yaitu tabungan selain Tabanas dan Taska (Sinungan, 1993: 91 - 92).

Dewasa ini banyak bermunculan produk-produk bank berupa tabungan dengan persyaratan dan hadiah yang bermacam-macam. Hal tersebut menambah minat masyarakat untuk menabung. Masing-masing bank menawarkan jenis tabungannya, masyarakat tinggal menentukan nama yang akan dipilihnya.

Di antara ketiga jenis dana masyarakat yang dihimpun perbankan, tabungan merupakan dana yang terbanyak yang dapat dihimpun, dikarenakan masyarakat lebih menyukai menyimpan dananya dalam bentuk tabungan yang



menjanjikan hasil yang besar dari tingkat suku bunga yang tinggi dan juga dapat diambil dalam jangka waktu yang cukup singkat.

Tabungan pada tahun-tahun terakhir ini sangat meningkat pesat dibandingkan dengan giro. Jumlah tabungan yang dapat dihimpun perbankan adalah yang terbanyak, setelah itu deposito, dan menyusul giro.

## **2.3 Modal**

Perkembangan dan kemajuan perbankan sangat ditentukan oleh modal perbankan. Selain untuk menunjang kegiatan perbankan, juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Semakin besar modal suatu bank, berarti semakin dapat dipercaya oleh masyarakat dalam hal jika terjadi kerugian, bank tersebut dapat menanggulangnya dengan modal yang dimiliki.

### **2.3.1 Fungsi Modal**

Fungsi utama dari modal bank adalah melindungi para penyimpan uang (deposan) dari kerugian yang timbul. Modal bank adalah menifestasi dari keinginan para pemegang saham untuk berperan dalam bisnis perbankan. Modal bank digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang harus melebihi jumlah setoran modal dari pemegang saham.

Kepercayaan masyarakat amat penting artinya bagi bank, karena dengan demikian bank akan dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional. Ini berarti modal dasar bank akan bisa digunakan untuk menjaga

posisi likuiditas dan investasi dalam aktiva tetap seperti gedung kantor dan perlengkapan kantor modern serta teknologi komputer dan komunikasi yang amat diperlukan bagi bank. Pembangunan gedung kantor ataupun renovasi dan penyediaan fasilitas kantor yang modern dan didukung oleh peralatan komputer dan komunikasi yang baik dan canggih, bersumber dari dana permodalan bank, yaitu dari dana cadangan umum yang selalu bertambah setiap tahun (Sinungan, 1993: 158 - 159).

Setelah pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 29 Mei 1993, modal berfungsi pula dalam menentukan besar kecilnya LDR perbankan, karena sesuai dengan kebijakan tersebut modal dimasukkan pula dalam perhitungan LDR, supaya LDR perbankan dapat diperkecil. LDR perbankan yang kecil dapat memberi peluang bagi perbankan untuk mengadakan ekspansi kredit.

### **2.3.2 Pengertian Modal**

Modal bank terdiri atas Modal Inti dan Modal Pelengkap. Pembagian modal bank ini sesuai dengan ketentuan perbankan.

Adapun rincian komponen dari masing-masing modal tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Modal Inti**

Modal inti terdiri atas:

##### **1. Modal disetor**

2. Agio saham
3. Cadangan umum
4. Cadangan tujuan
5. Laba yang ditahan (retained earnings)
6. Laba tahun-tahun lalu
7. Laba tahun berjalan
8. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (minority interest) (Sinungan, 1993: 164 - 165).

Modal yang disetor merupakan jumlah uang yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Modal yang disetor adalah modal yang wajib disetor oleh para pemilik saham.

Agio saham merupakan selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Agio saham termasuk dalam modal inti, karena agio saham tidak langsung dibagikan, melainkan setelah diadakan perhitungan. Untuk jika terjadi kerugian atau sesuatu yang memerlukan modal, maka agio saham dapat digunakan sebagai modal.

Cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak merupakan cadangan umum. Pembentukan cadangan umum ini harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.

Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.

Laba yang ditahan adalah laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

Laba tahun-tahun yang lalu adalah laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

Sedangkan laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya 50%. Dalam hal ini pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

Bagian kekayaan bersih anak perusahaan juga merupakan unsur modal inti, dimana kekayaan bersih anak perusahaan tersebut adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

## b. Modal Pelengkap

Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap
2. Cadangan penghapusan aktiva tetap yang diklasifikasikan.
3. Modal kuasi yang menurut BIS disebut hybrid (debt/equity) capital instrument,
4. Pinjaman subordinasi (Sinungan, 1993: 166 - 167).

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal.

Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan adalah cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.

Modal kuasi adalah modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang.

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.

- Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinari tersebut.
- Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
- Minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun.
- Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari BI, dan dengan pelunasan tersebut permodalan tetap sehat.
- Hal tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal (Sinungan, 1993: 164-167).

Jadi modal perbankan itu terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, di mana keduanya turut menentukan LDR perbankan. Dengan masuknya modal dalam perhitungan LDR dapat membuat LDR menjadi kecil, sebab modal perbankan ada dalam jumlah yang besar. Semakin besar modal perbankan, maka semakin kecil LDR perbankan, karena modal termasuk dalam total dana perbankan yang berfungsi sebagai pembagi dalam perhitungan LDR.

Jika perbankan ingin memperbesar jumlah kredit yang disalurkan, maka perbankan harus memperbesar modal yang dimiliki, disamping memperbesar dana yang dihimpun dari masyarakat.

## 2.4 Pengertian LDR

LDR (Loan to Deposit Ratio) adalah perbandingan antara jumlah kredit

yang disalurkan dengan dana yang dihimpun perbankan.

Penetapan LDR dimaksudkan untuk membatasi perbankan dalam pemberian kredit dan juga untuk penilaian tingkat kesehatan bank.

Dengan ketentuan LDR berada antara 85% - 110%, berarti perbankan dalam memberikan kredit, LDRnya tidak boleh di bawah 85% ataupun melebihi 110%.

LDR dibawah 85% berarti kredit yang disalurkan sedikit dibandingkan dengan dana yang dihimpun. LDR di atas 110% berarti kredit yang disalurkan sangat banyak dibandingkan dengan dana yang dihimpun. Jadi semakin banyak dana yang dapat dihimpun, maka semakin banyak pula kredit yang dapat disalurkan.

## **2.5 Peluang Ekspansi Kredit Perbankan**

### **2.5.1 Pengertian Peluang**

Peluang di sini diartikan sebagai kesempatan atau keluasan untuk melakukan sesuatu. Jadi peluang ekspansi kredit perbankan adalah kesempatan atau keluasan perbankan untuk melakukan ekspansi kredit.

Adanya kondisi tertentu dapat menciptakan suatu peluang ataupun sebaliknya justru menghilangkan peluang.

Adakalanya perbankan ingin melakukan ekspansi kredit, namun situasi dan kondisi tidak mengizinkan, karena adanya peraturan yang membatasi. Ini berarti bahwa perbankan tidak mempunyai peluang untuk ekspansi kredit.

Dalam hal ini, jika LDR suatu bank 100% maka bank tersebut masih mempunyai peluang untuk melakukan ekspansi kredit sebesar 10%.

### 2.5.2 Ekspansi Kredit Perbankan

Ekspansi kredit perbankan berarti perluasan pemberian kredit yang dilakukan perbankan. Ekspansi kredit merupakan usaha perbankan dalam meningkatkan kreditnya.

Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi, perbankan sangat diharapkan melakukan ekspansi kredit. Berbagai usaha dilakukan agar kredit perbankan dapat meningkat.

Laju pertumbuhan kredit perbankan mengalami kenaikan pada tahun 1990. Sedangkan pada tahun 1991 pertumbuhan kredit mulai berkurang. Faktor penyebab melambatnya pertumbuhan kredit perbankan adalah:

- Kebijaksanaan uang ketat yang menyebabkan suku bunga meningkat dan mengganggu kelancaran aktivitas bisnis, yang berdampak menurunnya permintaan kredit investasi.
- Dunia perbankan sendiri sedang mengadakan konsolidasi dalam rangka memenuhi tingkat kesehatan perbankan sesuai dengan kriteria CAMEL (Capital, Asset quality, Management, Earning, and Liquidity) seperti yang dianjurkan Bank Indonesia.

Pada tahun 1993/1994 kredit perbankan diharapkan meningkat sebesar 17%. Awalnya terjadi kelambatan dalam peningkatan kredit perbankan.



Masalah lambatnya peningkatan kredit perbankan disebabkan antara lain:

- Keengganan bank-bank untuk meningkatkan pemberian kredit sehubungan dengan kondisi aktiva produktif dari bank yang bersangkutan.
- Adanya beberapa ketentuan dalam rangka pelaksanaan prudent banking yang menyebabkan bank-bank terpaksa membatasi perluasan pemberian kreditnya.

Namun ternyata di akhir tahun 1993 terjadi ekspansi besar-besaran pada kredit perbankan terutama oleh bank-bank swasta. Ekspansi kredit bank swasta terutama pada sektor properti. Jadi target ekspansi kredit perbankan sebesar 17% dapat tercapai, bahkan melebihi target.

## BAB III

### METODOLOGI

#### 3.1 Kerangka Konseptual

Perbankan dalam menyalurkan kreditnya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain CAR dan LDR. Ketentuan-ketentuan tersebut dikeluarkan pemerintah untuk menjaga kesehatan perbankan dan kestabilan ekonomi.

Menurut ketentuan Bank Indonesia, perbankan dikatakan sehat jika LDR-nya berada diantara 85% dan 110%. Batas tersebut yang aman bagi perbankan dalam ekspansi kredit dan juga digunakan oleh Bank Indonesia dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank. Jika LDRnya terlalu tinggi, bank yang bersangkutan termasuk dalam kategori terlalu ekspansif.

LDR (Loan to Deposit Ratio) adalah perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun perbankan. Semakin banyak dana yang dihimpun, maka semakin banyak pula kredit yang dapat disalurkan.

Secara umum LDR adalah total kredit dibagi dengan deposito, tabungan, giro, kewajiban segera lainnya, dikurangi dana tiga bulan kebawah.

Dengan mengetahui total kredit dan juga jumlah deposito, tabungan, giro, dan modal perbankan, maka dapatlah diketahui LDR perbankan tersebut. Dari perhitungan LDR tersebut dapat diketahui apakah bank yang bersangkutan LDRnya masih berada dalam batas yang aman atau tidak, dan juga dapat

diketahui apakah bank yang bersangkutan masih mempunyai peluang ekspansi kredit atau tidak.

Dunia usaha sangat membutuhkan dana perbankan. dengan demikian perlu diketahui bagaimana posisi LDR perbankan di Sulawesi Selatan, agar dapat diketahui bagaimana peluang bagi perbankan dalam mengadakan ekspansi kredit.

### **3.2 Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan pada obyek yang berkaitan, dalam hal ini Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik.
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan obyek yang diteliti serta artikel lainnya yang dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian yang secara langsung dapat digunakan dalam pembahasan skripsi ini, antara lain ; perkembangan perbankan di Sulawesi Selatan, pertumbuhan kredit perbankan di Sulawesi Selatan serta ekspansi kredit perbankan menurut jenis dan sektor ekonomi.

Adapun data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari :

1. Perwakilan Biro Pusat Statistik di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.
2. Laporan Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang.
3. Majalah, artikel serta buku-buku lainya yang berkaitan dengan data yang diperlukan.

### 3.4 Metode Analisis

Dalam menganalisa pokok permasalahan yang telah dikemukakan, maka untuk pembuktian hipotesis penulis menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$(1) \text{ LDR} = \frac{\text{total kredit}}{\text{dep} + \text{tab} + \text{giro} + \text{KSL} - \text{DTBB}}$$

$$(2) \text{ LDR} = \frac{\text{total kredit}}{\text{dep} + \text{tab} + \text{giro} + \text{KSL}}$$

$$(3) \text{ LDR} = \frac{\text{total kredit}}{\text{dep} + \text{tab} + \text{giro} + \text{KSL} + \text{Modal}}$$

di mana :

dep = deposito

tab = tabungan

KSL = Kewajiban segera lainnya

DTBB = Dana tiga bulan ke bawah

Rumus (1) merupakan rumus umum yang digunakan perbankan.

Rumus (2) merupakan rumus yang digunakan sebelum berlaku kebijaksanaan 29

Mei 1993, di mana dana tiga bulan ke bawah tidak termasuk dalam

perhitungan.

Rumus (3) merupakan rumus yang berlaku menurut Kebijakan 29 Mei 1993, di mana pengertian LDR diperluas, tidak hanya mencakup dana pihak ketiga, tetapi juga modal sendiri.

Adapun yang termasuk dalam Kewajiban Segera Lainnya (KSL) sebagai berikut :

- Kredit usaha keluar yang belum dikreditkan
- Kredit usaha masuk yang belum dikreditkan
- Hasil inkaso masuk yang belum ditransfer
- Hasil inkaso keluar yang belum dibayar
- PPh 21 % yang masih harus disetor
- PPh 23 % tabungan / deposito yang harus disetor
- Hutang bunga deposito
- Setoran jaminan bank yang jatuh tempo
- Hutang kepada supplier
- Setoran untuk kiriman uang dalam / luar negeri
- Setoran rekening PLN
- Setoran rekening telepon

Sedang yang dimaksud dengan dana tiga bulan kebawah (DTBB) adalah simpanan deposito jangka pendek (deposito 1 bulan dan deposito 3 bulan).

### 3.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah bahasan dan pemahaman, maka penulisan ini dibagi atas beberapa bab sebagai berikut :

*Bab pertama*, pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan serta hipotesis yang mendasari penelitian.

*Bab kedua*, berisikan tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa konsep teori, yakni pengertian dan jenis-jenis kredit, pengertian dan jenis-jenis sumber dana, pengertian dan jenis-jenis modal, Pengertian LDR, dan pengertian ekspansi kredit perbankan.

*Bab Ketiga*, adalah metodologi yang meliputi metode penelitian, jenis dan sumber data, metode analisis serta sistematika penulisan.

*Bab keempat*, adalah bab pembahasan atau bab analisa mengenai sumber dan ekspansi kredit perbankan di Sulawesi Selatan yang memuat tentang perkembangan dan potensi sumber dana perbankan di Sulawesi Selatan serta ekspansi kredit perbankan di Sulawesi Selatan menurut jenis dan sektor ekonomi, LDR perbankan di Sulawesi Selatan periode 1983 - 1996.

*Bab kelima*, adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB IV

### SUMBER DANA DAN EKSPANSI KREDIT PERBANKAN DI SULAWESI SELATAN

#### 4.1 Perkembangan Perbankan di Sulawesi Selatan

Sejak tahun 1983 sampai sekarang, perbankan telah melalui serangkaian deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan. Diawali dengan diberlakukannya Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983, di mana pemerintah memberlakukannya sebagai antisipasi dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Inti deregulasi 1 Juni 1983 adalah: dihapuskannya sistem pagu kredit, bank mempunyai kebebasan untuk menentukan tingkat bunga pinjaman dan deposito, serta kredit likuiditas dari Bank Indonesia secara bertahap diturunkan.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988. Paket Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi tabungan nasional, meningkatkan efisiensi lembaga keuangan.

Dalam Pakto 27, langkah pemerintah di bidang pengerahan dana masyarakat meliputi kemudahan dalam pembukaan kantor bank, pembukaan kantor cabang LKBB, pendirian bank swasta baru, pendirian dan usaha BPR, penerbitan sertifikat deposito, dan perluasan tabungan.

Kesempatan dan kemudahan tersebut telah dimanfaatkan oleh perbankan, walaupun sempat terjadi pertumbuhan yang melambat dikarenakan daya serap

perekonomian yang terbatas, khususnya berkaitan dengan kebijaksanaan moneter yang berhati-hati dalam rangka menyejukan suhu perekonomian. Kemampuan ekspansi perbankan juga dipengaruhi oleh upaya konsolidasi internal dalam menyesuaikan dengan kebijaksanaan pengelolaan bank atas dasar prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Kebijakan 28 Februari 1991.

Pada tahun 1993 perekonomian Indonesia berada dalam tahap konsolidasi dan pematangan yang ditandai oleh pertumbuhan uang beredar dan dana perbankan yang cukup besar. Namun demikian arus penyaluran dana perbankan kepada dunia usaha tidak begitu lancar, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya keengganan bank untuk meningkatkan memperluas kredit serta adanya ketentuan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dapat membatasi perluasan kredit.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan Kebijakan 29 Mei 1993 dengan maksud untuk:

- Menyempurnakan beberapa ketentuan perbankan agar lebih mendorong perluasan kredit dengan tetap berpedoman pada azas-azas perkreditan yang sehat.
- Mendorong perbankan untuk menangani masalah kredit macet yang dihadapi secara konseptual.
- Tetap mengendalikan pertumbuhan uang beredar dan kredit perbankan agar selalu dalam batas-batas yang aman bagi stabilitas ekonomi.

Untuk selanjutnya pemerintah masih akan mengeluarkan kebijaksanaan



deregulasi di bidang keuangan dan perbankan yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan industri perbankan dan pertumbuhan ekonomi.

Dari serangkaian kebijaksanaan deregulasi perbankan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dapat dilihat bahwa paket kebijaksanaan tersebut telah mendorong pertumbuhan industri perbankan. Pertumbuhan industri perbankan itu dapat diukur dari berbagai indikator, seperti penambahan jumlah bank, perkembangan jaringan bank, volume pinjaman, dan volume dana yang dapat dihimpun.

Dari segi penambahan jumlah bank, sejak deregulasi telah muncul puluhan nama bank baru, baik yang merupakan hasil patungan antara bank swasta nasional dengan bank asing, bank swasta nasional baru, maupun dari bank pedesaan yang dikenal sebagai bank perkreditan rakyat.

Volume dana yang dapat dihimpun meningkat secara drastis karena banyaknya perangsang yang ditawarkan kepada para pemilik dana. Fasilitas kredit konsumtif yang masa sebelum pakto sulit dinikmati, saat ini hampir setiap orang yang berpenghasilan cukup dapat memperoleh fasilitas kredit dan bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Rasio jumlah kantor bank terhadap jumlah penduduk yang biasanya dipakai sebagai ukuran tingkat pelayanan bank yang tersedia mengalami perbaikan dengan semakin meluasnya jaringan kantor bank.

Dengan adanya serangkaian deregulasi tersebut, kondisi perbankan di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan kondisi perbankan Indonesia secara

umum.

Pada tahun-tahun tertentu di Sulawesi Selatan terjadi peningkatan penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit yang cukup pesat sebagai reaksi dari pemberlakuan paket deregulasi tersebut.

Peningkatan dalam hal jumlah bank dan kantor bank juga terjadi, dimana sebelum dikeluarkan paket deregulasi bank yang ada di Sulawesi Selatan hanya beberapa saja, namun setelah adanya paket deregulasi dapat dilihat bahwa jumlah bank semakin hari semakin bertambah dan cukup pesat pertumbuhannya.

**Tabel IV - 1**  
**Jumlah Bank dan Kantor Bank di Sulawesi Selatan**

Tahun	Jumlah Bank	Jumlah Kantor Bank
1989/90	29	211
1989/90	29	213
1989/90	32	224
1989/90	262	249
1990	36	262
1991	38	298
1992	40	314
1993	42	316
1994	52	344
1995	53	353
1996	60	400

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang

Perkembangan jumlah bank dan kantor bank di Sulawesi Selatan meningkat, di mana pada tahun 1990 terdapat 26 bank dengan 262 kantor bank dan pada tahun 1991 meningkat menjadi 38 bank dengan 298 kantor bank.

Peningkatan yang sangat pesat terjadi pada tahun 1994, yaitu dari 42 bank meningkat menjadi 52 bank dan dari 316 kantor bank menjadi 344 kantor bank.

Jumlah bank di Sulawesi Selatan sampai Mei 1996 tercatat sebanyak 60 bank dengan 400 kantor bank. Sebagian bank-bank berlokasi di Ujung Pandang, dikarenakan Ujung Pandang merupakan kota terbesar di Sulawesi Selatan dan juga merupakan ibukota propinsi, sehingga kegiatan usaha terpusat di Ujung Pandang. Untuk Dati II lainnya di Sulawesi Selatan sudah terdapat bank dan hampir di semua Dati II sudah terdapat bank swasta. Ini menandakan bahwa perbankan di Sulawesi Selatan mengalami perkembangan.

Penghimpunan dana masyarakat di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan selalu mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan semakin banyaknya bank-bank baru didirikan dan juga semakin banyaknya produk-produk perbankan yang ditawarkan.

Untuk penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada tahun 1989 dan 1990. Kemudian pertumbuhannya menurun, bahkan mengalami pertumbuhan negatif dalam arti penyaluran kredit berkurang pada tahun 1992, karena berada dalam kondisi uang ketat. Memasuki tahun 1994 penyaluran kredit mulai meningkat lagi dan pada akhir tahun 1994, jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan sebesar Rp. 2.264,46 miliar dengan pertumbuhan sebesar 42,83%.

## 4.2 Perkembangan Sumber Dana Perbankan di Sulawesi Selatan

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa penghimpun dana untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan menghimpun dana sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.

Sumber dana perbankan yang ada berasal dari dana pihak I, dana pihak II, dan dana pihak III. Dana pihak I berupa modal setor yang berasal dari para pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap (permanen). Sedangkan untuk dana pihak II hanya dalam keadaan tertentu saja diperlukan. Dana pihak III ini yang senantiasa mengalami perubahan dan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank.

Dana pihak III, yaitu dana yang berasal dari masyarakat ini yang harus dikelola oleh bank sebaik mungkin untuk memperoleh keuntungan. Sumber dana yang berasal dari masyarakat ini berupa giro, deposito, dan tabungan.

Berdasarkan jenisnya, pada akhir tahun 1996, tabungan mempunyai peranan yang paling dominan dalam pengerahan dana masyarakat, yaitu sebesar Rp.1.536,625 miliar (49,4%). Sedangkan deposito tercatat sebesar Rp. 983,604 miliar (31,6%) dan giro tercatat sebesar Rp.590,130 miliar (18,9%).

Tabel IV - 2

## Perkembangan Dana Masyarakat di Sulawesi Selatan

Tahun	Giro	Deposito	Tabungan	Total
1983	52,737	20,567	25,456	98,760
1984	70,580	34,493	31,716	136,789
1985	92,757	65,036	43,589	201,382
1986	101,352	83,118	66,382	250,852
1987	98,868	124,873	78,035	301,776
1988	120,995	153,553	101,946	376,494
1989	166,986	238,824	179,566	585,376
1990	214,192	316,580	292,194	822,966
1991	281,548	494,570	449,005	1.225,123
1992	242,830	571,972	654,176	1.468,978
1993	319,990	608,605	850,168	1.778,763
1994	361,120	697,333	1.022,475	2.080,928
1995	477,244	795,718	1.226,539	2.499,501
1996	590,2130	983,604	1.536,625	3.110,359

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang.

Besarnya jumlah tabungan dibandingkan dengan deposito dan giro, dikarenakan tabungan mempunyai daya tarik tersendiri, antara lain karena disediakan berbagai bentuk dan pilihan tabungan yang menjanjikan hadiah yang menarik, suku bunga yang bersaing, dan pelayanan yang mudah.

Dengan demikian tabungan dapat berfungsi ganda, yaitu selain sebagai sarana penyimpanan dana dan juga sebagai penunjang kebutuhan transaksi. Kondisi ini didukung oleh sarana yang lebih maju yaitu dengan adanya tabungan yang dilengkapi Automatic Teller Machine (ATM) yang mampu melayani nasabah

setiap saat selama 24 jam, serta sistem jaringan komunikasi terpadu, sehingga nasabah dapat memanfaatkan jasa-jasa bank secara lebih luas.

Pertumbuhan giro sering mengalami penurunan, bahkan pada tahun 1987 dan tahun 1992 terjadi pertumbuhan negatif yaitu -2,45% dan -13,75%. Tingkat pertumbuhan yang terbesar yaitu pada tahun 1989 sebesar 38,01%.

Dewasa ini giro memberikan tawaran yang cukup menarik. Walaupun motif penyimpanan dana dalam bentuk giro pada umumnya untuk menunjang kelancaran transaksi, namun beberapa bank telah menciptakan simpanan giro, khususnya giro valas, menjadi sarana penyimpanan dana dengan tawaran suku bunga yang menarik dan persyaratan yang ringan. Modifikasi tersebut telah menarik masyarakat untuk menjadikan giro sebagai bagian dari portofolio simpanannya, selain untuk mengantisipasi terjadinya apresiasi mata uang asing atau kebijaksanaan devaluasi.

Deposito senantiasa mengalami pertumbuhan positif, tetapi tingkat pertumbuhannya sering mengalami penurunan, dalam arti tiap tahun jumlah deposito selalu bertambah, tetapi pertumbuhannya tidak meningkat. Jika dibandingkan dengan giro, jumlah deposito lebih besar dikarenakan masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk deposito untuk memperoleh keuntungan dari tingkat bunganya.

**Tabel IV - 3**  
**Pertumbuhan Giro, Deposito, dan Tabungan**  
**di Sulawesi Selatan**

Tahun	Giro	Deposito	Tabungan
1983	-	-	-
1984	33,83	67,71	24,46
1985	31,42	88,55	37,44
1986	9,27	27,80	52,29
1987	-2,45	50,24	17,55
1988	22,38	22,97	30,64
1989	38,01	55,53	76,14
1990	28,27	32,56	62,72
1991	31,45	56,22	53,67
1992	-13,75	15,65	45,69
1993	31,78	6,40	29,96
1994	12,85	14,58	20,27
1995	32,15	14,10	19,95
1996	23,65	23,61	25,28

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang

Dari ketiga jenis dana masyarakat, yang mengalami pertumbuhan yang pesat adalah tabungan. Pada awalnya jumlah tabungan tidak seberapa besarnya dibandingkan giro dan deposito, namun pada tahun-tahun berikutnya tabungan berkembang pesat bahkan jumlahnya jauh lebih besar daripada giro dan deposito.

Penghimpunan dana masyarakat mengalami perkembangan yang pesat. Untuk tahun 1996 penghimpunan dana mencapai Rp. 3.110,359 milliar dengan pertumbuhan sebesar 24,43%.

**Tabel IV - 4**  
**Pertumbuhan Dana Masyarakat di Sulawesi Selatan**

Tahun	Pertumbuhan Dana Masyarakat
1983	-
1984	38,51
1985	47,22
1986	24,57
1987	20,30
1988	24,76
1989	55,48
1990	40,59
1991	48,87
1992	19,90
1993	21,09
1994	16,99
1995	20,11
1996	24,43

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang

Tingginya kenaikan penghimpunan dana masyarakat di tahun 1989 merupakan akibat dari diberlakukannya Pakto, dimana perbankan berlomba-lomba menghimpun dana masyarakat sejalan dengan semakin banyaknya bermunculan bank-bank baru. Pertumbuhan dana masyarakat pada tahun 1989 sebesar 55,48% merupakan pertumbuhan tertinggi.

Tahun 1992 pertumbuhan penghimpunan dana mulai berkurang karena berada dalam kondisi uang ketat. Pihak perbankan mengalami kesulitan dalam mencari sumber dana, terjadi keributan dana masyarakat. Bank-bank mengalami persaingan ketat, saling mengungguli tingkat bunga, dan bersaing memberi



hadiah. Ini mengakibatkan dana menjadi mahal dan menyebabkan pertumbuhan penghimpunan dana menurun.

**Tabel IV - 5**  
**Perkembangan Dana Perbankan di Sulawesi Selatan**

Tahun	Bank Pemerintah		Bank Swasta		Total
	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)
1983	73.401	74,32	25.359	25,68	98.760
1984	93.786	69,39	41.370	30,61	135.156
1985	139.830	69,55	61.207	30,45	201.037
1986	186.075	74,18	64.777	25,82	250.852
1987	209.513	69,43	92.263	30,57	301.776
1988	259.223	68,85	117.271	31,15	376.494
1989	341.127	58,27	244.249	41,73	585.376
1990	513.473	62,71	305.267	37,29	818.739
1991	739.423	60,36	485.700	39,64	1.225.123
1992	971.277	66,12	497.701	33,88	1.468.978
1993	1.157.070	65,12	619.625	34,88	1.776.695
1994	1.233.921	59,45	841.723	40,55	2.075.644
1995	1.375.809	55,04	1.123.692	44,95	2.499.501
1996	1.646.241	52,9	1.464.118	47,07	3.110.359

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang

Jika dilihat dari besarnya dana yang dapat dihimpun perbankan, maka bank pemerintahlah yang terbesar penghimpunan dananya di bandingkan bank swasta. Hal ini dapat dilihat pada tabel tersebut diatas.

#### **4.3 Ekspansi Kredit Perbankan Menurut Jenis dan Sektor Ekonomi**

Usaha perbankan adalah menghimpun dana dengan menggali berbagai sumber, baik dari masyarakat umum maupun dari lembaga-lembaga keuangan. Dana yang terhimpun tersebut selanjutnya dikelola untuk kemudian disalurkan

atau ditanamkan dalam berbagai bentuk atau dipergunakan oleh masyarakat yang membutuhkan atau dipergunakan oleh bank sendiri sebagai suatu penanaman dana, baik yang menghasilkan atau yang tidak menghasilkan.

Dalam memilih alternatif penanaman dana tersebut, tentunya bank memperitungkan segi hasilnya (keuntungan) dan juga harus memperhitungkan besarnya resiko.

Menurut Thomas Suyatno dkk, dalam bukunya yang berjudul Kelembagaan Perbankan menyatakan bahwa:

Berbagai bentuk penanaman dana yang dapat dilakukan perbankan adalah:

- a. Penanaman dana dalam bentuk pinjaman/kredit
- b. Penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga
- c. Penanaman dana dalam bentuk penyertaan
- d. Penanaman dana dalam bentuk harta tetap dan inventaris.

Penanaman dana dalam bentuk pinjaman/kredit yang lebih diprioritaskan oleh perbankan, karena sebagai besar dana perbankan ditanamkan dalam bentuk kredit, selain menguntungkan juga memang banyak permintaan akan kredit.

Banyaknya permintaan akan kredit mengharuskan perbankan makin selektif dalam memberikan kredit. Semakin banyak pemberian kredit akan mendorong perbankan semakin ekspansif. Jika perbankan terlalu ekspansif, maka kemungkinan terjadi kredit macet semakin besar.

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, kredit sangat berguna

bagi kemajuan suatu usaha. Pada umumnya suatu perusahaan banyak memanfaatkan kredit untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya. Usaha yang meningkat turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu upaya penyaluran kredit perbankan terus ditingkatkan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit perbankan, berbagai upaya telah dilakukan Bank Indonesia. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim yang kondusif yang bertujuan untuk mendorong penurunan suku bunga, membantu meringankan bank-bank dalam pemenuhan ketentuan prinsip kehati-hatian di bidang pembinaan dan pengawasan melalui Paket Kebijakan 29 Mei 1993, serta membantu bank-bank dalam penanggulangan kredit bermasalah.

Upaya-upaya tersebut telah memberi dampak positif, seperti menurunnya suku bunga dan semakin banyaknya bank yang berhasil mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses konsolidasi. Ditunjang dengan membaiknya kegiatan di sektor riil, keadaan tersebut telah dapat mendorong ekspansi kredit perbankan.

Penyaluran kredit di Sulawesi Selatan senantiasa mengalami pertumbuhan positif, kecuali pada tahun 1992 pertumbuhan negatif yaitu -0,93%, di mana penyaluran kredit berkurang. Hal tersebut dikarenakan sedang berada dalam kondisi uang ketat, tingkat suku bunga meningkat, dana menjadi mahal, dan semakin meningkatnya kredit macet.

Tabel IV - 6

## Pertumbuhan Kredit Perbankan di Sulawesi Selatan

Tahun	Pertumbuhan Kredit Perbankan
1983	-
1984	15,16
1985	12,09
1986	13,71
1987	12,59
1988	25,33
1989	40,72
1990	47,05
1991	6,24
1992	-0,93
1993	14,98
1994	42,98
1995	18,42
1996	24,31

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang

Setelah diberlakukan Paket Kebijakan 29 Mei 1993, penyaluran kredit perbankan berangsur-angsur meningkat. Sampai akhir tahun 1994 tercatat pertumbuhan kredit sebesar 42,98%. Memasuki tahun 1995 permintaan kredit perbankan masih tetap besar, sehingga penyaluran kredit perbankan masih tetap akan mengalami pertumbuhan. Sampai Mei 1996 jumlah kredit perbankan yang telah disalurkan sebesar 3.342,30 miliar dan masih akan terus meningkat sampai akhir tahun.

**Tabel IV - 7**  
**Penyaluran Kredit Perbankan di Sulawesi Selatan**  
**Menurut Bank**

Tahun	Bank Pemerintah		Bank Swasta		Total
	Nilai (juta Rp)	%	Nilai (juta Rp)	%	
1983	251,54	84,13	47,44	15,87	298,98
1984	274,67	79,77	69,64	20,23	344,31
1985	297,97	76,95	88,97	23,05	385,94
1986	339,87	77,45	98,98	22,55	438,85
1987	373,42	75,58	120,66	24,42	494,08
1988	463,50	73,10	170,56	26,90	634,06
1989	615,28	68,90	276,98	31,10	892,26
1990	782,28	59,60	530,09	40,40	1.312,10
1991	871,70	62,53	522,31	37,47	1.394,01
1992	943,61	68,32	437,42	31,68	1.381,03
1993	1.077,38	67,85	510,50	32,15	1.587,88
1994	1.538,65	67,77	731,71	32,23	2.270,36
1995	1.777,48	66,11	991,12	33,89	2.688,60
1996	2.341,72	70,04	1.001,58	29,96	3.342,30

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang

Hal yang menarik untuk diamati adalah proporsi penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank pemerintah dan bank swasta. Pada tahun 1983 kredit yang disalurkan bank swasta hanya 15,87%. Tahun-tahun berikutnya terjadi kecenderungan peningkatan porsi kredit swasta di Sulawesi Selatan dan yang tertinggi dicapai pada tahun 1990 yakni sebesar 40,40%. Keadaan ini cukup mengembirakan dan sejalan dengan keinginan pemerintah untuk terus mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam bidang ekonomi di Indonesia.

Namun setelah tahun 1990 terjadi kecenderungan penurunan porsi kredit swasta sejalan dengan mulai berkurangnya pertumbuhan kredit di Sulawesi Selatan. Kredit swasta perlahan-lahan mulai meningkat lagi pada tahun 1993.

Kredit yang disalurkan perbankan menurut jenisnya adalah kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Jenis kredit yang tersebar adalah kredit modal kerja menyusul kredit investasi, dan yang terkecil adalah kredit konsumsi.

Modal kerja dan investasi merupakan faktor utama dalam setiap kegiatan ekonomi. Modal kerja dipakai untuk kepentingan jangka pendek dan diarahkan untuk operasional kegiatan suatu usaha. Sedangkan investasi dipakai untuk kepentingan yang panjang, untuk operasional kegiatan perusahaan, dan untuk perluasan/pertumbuhan usaha.

Kegiatan investasi menimbulkan perkembangan kegiatan ekonomi yang bersangkutan dan juga ekonomi lainnya sebagai tanggapan atas adanya investasi tersebut. Kegiatan investasi membutuhkan barang dan jasa dari kegiatan ekonomi lainnya, sehingga dengan adanya perluasan tersebut akan memperluas pula kesempatan kerja.

Modal kerja dan investasi memegang peranan penting dalam setiap kegiatan ekonomi, di mana modal kerja sangat menentukan kelangsungan kegiatan produksi, sedangkan investasi sangat menentukan likuiditas atau prospek dari kegiatan tersebut. Tanpa modal kerja tidak mungkin suatu kegiatan dapat

berlangsung dan menghasilkan suatu produksi, sedangkan modal kerja yang tinggi tanpa adanya investasi sangat diragukan sehat tidaknya kegiatan tersebut.

**Tabel IV - 8**  
**Penyaluran Kredit Perbankan di Sulawesi Selatan**  
**Menurut Jenis**  
 (miliar Rp)

Tahun	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Total
1983	160,52	103,32	35,24	298,98
1984	188,59	115,68	40,04	344,31
1985	204,80	126,46	54,68	385,94
1986	243,65	120,33	74,87	438,85
1987	289,91	122,32	81,85	494,08
1988	389,19	133,90	110,98	634,07
1989	466,56	183,72	150,16	800,44
1990	826,75	261,49	223,87	1.312,11
1991	806,76	331,80	255,44	1.394,01
1992	795,72	330,70	254,61	1.381,03
1993	858,94	403,80	325,14	1.587,88
1994	1.053,40	771,39	445,57	2.270,36
1995	1.234,23	885,74	576,58	2.696,55
1996	1.368,45	1.128,24	867,73	3.364,42

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang

Dari tahun 1983 sampai tahun 1990, kredit modal kerja selalu meningkat, bahkan jumlahnya lebih dua kali lipat dari kredit investasi. Di tahun 1991 dan tahun 1992 terjadi penurunan jumlah kredit modal kerja. Sementara itu kredit investasi masih meningkat di tahun 1991, tetapi menurun di tahun 1992, karena secara keseluruhan penyaluran kredit perbankan memang menurun.

**Tabel IV - 9**  
**Proporsi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi,**  
**dan Kredit Konsumsi di Sulawesi Selatan**

Tahun	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
1983	53,69	34,52	11,79
1984	54,77	33,60	11,63
1985	53,06	32,77	14,17
1986	55,52	27,42	17,06
1987	58,68	24,76	16,56
1988	61,38	21,12	17,50
1989	58,29	22,95	18,76
1990	63,01	19,93	17,06
1991	57,87	23,80	18,33
1992	57,62	23,94	18,44
1993	54,09	25,43	20,48
1994	46,39	33,98	19,63
1995	45,77	32,84	21,38
1996	40,67	33,53	25,79

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang

Dari tabel dapat dilihat bahwa kredit modal kerja senantiasa mempunyai porsi terbesar. Pada tahun 1986, tercatat bahwa pihak perbankan menyisihkan 55,52 persen dari total kredit yang disediakan untuk dipakai sebagai modal kerja di sektor riil dan 27,42 persen untuk kepentingan investasi. lainnya sebesar 17,06 persen untuk kepentingan konsumsi.

Keadaan ini berangsur-angsur berubah dalam sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 1988 dan tahun 1990, pihak per-bankan menyisihkan lebih dari 60 persen kredit guna keperluan modal kerja. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, keadaan ini berangsur-angsur menurun, sehingga mencapai 40,67 persen dari



total kredit yang harus disediakan oleh perbankan pada tahun 1996. Hal ini merupakan presentase terendah sejak tahun 1986. Seiring dengan pergeseran itu, kebutuhan dana untuk investasi meningkat lebih cepat dari pada untuk keperluan lainnya. Sehingga pada tahun 1996 dana untuk investasi menyerap 33,54 persen dari seluruh kredit yang disediakan, dengan pertumbuhan sebesar 24,77 persen.

**Tabel IV - 10**  
**Penyaluran Kredit Perbankan di Sulawesi Selatan**  
**Menurut Sektor**  
 (juta Rp)

	1986	1987	1988	1989	1990	
Pertanian	28.603	28.716	44.336	74.501	89.828	
Pertambangan	120	66	149	311	1.249	
Perindustrian	99.715	99.804	112.647	135.913	185.581	
Perdagangan	181.059	216.328	279.021	401.357	631.770	
Konstruksi	22.315	27.988	36.001	48.219	69.752	
Angkutan	3.933	5.811	9.259	14.483	26.815	
Jasa-jasa	29.282	31.917	32.403	43.873	76.028	
Lain-lain	73.822	83.450	120.252	173.607	231.089	
<b>Total</b>	<b>438.849</b>	<b>494.080</b>	<b>634.068</b>	<b>892.264</b>	<b>1312.112</b>	
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Pertanian	104.577	117.021	125.925	157.303	166.474	177,912
Pertambangan	879	1.926	996	2.571	2.425	1,360
Perindustrian	176.893	171.482	203.653	466.645	458.080	589,186
Perdagangan	625.157	580.196	570.335	749.584	916,669	898,678
Konstruksi	77.941	91.474	127.717	185.040	222,271	270,807
Angkutan	25.873	44.154	52.544	93.886	170,493	266,141
Jasa-jasa	85.072	69.604	92.518	169.533	165,118	126,494
Lain-lain	297.614	306.136	412.183	445.797	595,013	1.034,310
<b>Total</b>	<b>1.394.006</b>	<b>1.381.993</b>	<b>1.587.875</b>	<b>2.270.359</b>	<b>2.696,543</b>	<b>3.364,858</b>

Sumber : Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang

Dilihat menurut sektornya, penyaluran kredit untuk semua sektor mengalami ekspansi pada tahun 1989 dan 1990. Pada tahun 1991 dan 1992 untuk beberapa sektor tidak terjadi ekspansi, dikarenakan pada tahun 1992 terjadi penurunan penyaluran kredit perbankan.

Diantara semua sektor, yang terkecil jumlah kreditnya adalah sektor pertambangan dan yang terbesar adalah sektor perdagangan.

Jika dilihat menurut jenisnya maupun menurut sektornya, kredit yang disalurkan perbankan mengalami ekspansi besar-besaran pada tahun 1989, sama halnya jika dilihat secara keseluruhan penyaluran kredit perbankan tersebut. Jadi ekspansi kredit di Sulawesi Selatan terjadi sebagai reaksi atas paket kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah.

## BAB V

### LDR PERBANKAN DI SULAWESI SELATAN

Pemerintah menginginkan adanya peningkatan kredit perbankan bagi dunia usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan pemberian kredit perbankan bagi sektor dunia usaha. Peningkatan kredit perbankan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan dapat mempertahankan stabilitas ekonomi.

Deri serangkaian deregulasi yang dikeluarkan pemerintah, Paket Kebijakan 1 Juni 1983 yang telah berhasil meningkatkan pemberian kredit perbankan. Terlebih lagi dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988, yang telah mendorong peningkatan kredit pada tahun 1989, dimana pertumbuhan kredit meningkat dari 25,33% menjadi 40,72% dan pada tahun 1990 mengalami pertumbuhan sebesar 47,05%.

Kemudahan yang diberikan kepada perbankan dalam hal membuka bank baru dan membuka cabang baru menyebabkan semakin banyaknya bank-bank bermunculan, selanjutnya menimbulkan persaingan antar bank dalam menghimpun dana. Dana yang telah terhimpun akan disalurkan berupa kredit, sehingga menimbulkan ekspansi secara besar-besaran di Sulawesi Selatan. Ini membuktikan bahwa Pakto mempunyai pengaruh besar terhadap peningkatan kredit perbankan, hal ini sesuai dengan harapan pemerintah.

Pakto juga memberikan kemudahan dalam hal menurunkan reserve requirement (cadangan wajib) dari 15% menjadi 2%. Cadangan wajib yang rendah ini mengakibatkan bank-bank memiliki kelebihan likuiditas yang sangat besar, sehingga berlomba-lomba mencari nasabah baru. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya pasok uang dan ekspansi meningkat lebih besar dari sebelumnya, jika diikuti oleh menurunnya tingkat bunga karena perbankan kelebihan likuiditas.

Perbankan yang secara tiba-tiba kelebihan dana menggunakan dana untuk ekspansi kredit secara agresif. Akibatnya yaitu menurunnya kualitas portofolio perbankan yang merupakan salah satu penyebab dari besarnya kredit macet yang terjadi.

Pada akhir tahun 1990, otoritas moneter menyimpulkan bahwa ekspansi kredit yang sangat besar tersebut sangat mengkhawatirkan dan inflasi mendekati 10%. Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan uang ketat yang didahului dengan Gebrakan Sumarlin II, di mana pemerintah mewajibkan dana-dana BUMN yang selama ini disimpan di bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta untuk dialihkan guna membeli Sertifikat Bank Indonesia.

Hal ini menyebabkan tingkat bunga meningkat menjadi 25%-27%, sehingga banyak perusahaan yang mengalami kesulitan cashflow dan menghadapi kesulitan untuk membayar pinjamannya.

Kredit perbankan mengalami ekspansi, bahkan terlalu ekspansif dan diikuti dengan meningkatnya kredit macet, untuk mengatasinya pemerintah menge-

luarkan Paket Kebijakan 28 Februari 1991 yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan bank secara berhati-hati. Salah satunya adalah mengenai ketentuan LDR yang batasnya antara 85% dan 110%. Hal ini menyebabkan ekspansi kredit sangat menurun, di mana pertumbuhan kredit hanya 6,24% pada tahun 1991, bahkan pada tahun 1992 mengalami pertumbuhan negatif yaitu -0,93% yang berarti jumlah kredit yang disalurkan berkurang dari tahun sebelumnya.

Perbankan diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan LDR tersebut, di mana perbankan mengurangi penyaluran kreditnya agar LDR yang semula di atas 110% dapat menjadi di bawah 110%.

Melalui Paket Kebijakan 29 Mei 1993, perbankan diberikan ke-longgaran dalam sejumlah kriteria penilaian kesehatan bank antara lain Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Kebijakan tersebut memberi keleluasan kepada perbankan untuk meningkatkan ekspansi kredit.

Kebijakan ini sangat membantu perbankan meningkatkan kredit, tetapi hasilnya tidak memadai, karena belum ada langkah-langkah yang berarti untuk menyelesaikan masalah utama yang dihadapi dunia perbankan yaitu masalah kredit macet.

Kebijakan mengenai LDR tersebut, yaitu diadakannya penyempuma-an terhadap LDR perbankan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu pengertian LDR diperluas, tidak hanya mencakup dana pihak ketiga, tetapi juga modal sendiri.

Rumus untuk LDR adalah:

$$\text{LDR} = \frac{\text{total kredit}}{\text{dep} + \text{tab} + \text{giro} + \text{KSL} - \text{DTBB}}$$

Untuk perhitungan unsur KSL (kewajiban segera lainnya), datanya tidak ada. Begitu pula dengan DTBB (dana tiga bulan ke bawah) tidak ada, tetapi sudah termasuk dalam deposito jangka pendek.

Setelah berlaku rumus LDR, di mana unsur DTBB tidak termasuk lagi, yaitu:

$$\text{LDR} = \frac{\text{total kredit}}{\text{dep} + \text{tab} + \text{giro} + \text{KSL}}$$

Data untuk KSL tidak ada.

Kemudian berlaku rumus menurut Kebijakanaksanaan 29 Mei 1993, yaitu:

$$\text{LDR} = \frac{\text{total kredit}}{\text{dep} + \text{tab} + \text{giro} + \text{KSL} + \text{Modal}}$$

Untuk perhitungannya, data KSL tidak ada, sedangkan modal tidak dapat dimasukkan berhubung untuk tingkat daerah atau cabang perbankan, modal itu tidak ada, modal perbankan hanya ada di tingkat pusat. Hampir semua bank yang ada di Sulawesi Selatan berkantor pusat di Jakarta atau kota lain, kecuali BPD Sulawesi Selatan yang berkantor pusat di Ujung Pandang. Untuk unsur modal di kantor cabang bank yang berada di suatu propinsi bisa diperhitungkan dengan keuntungan perusahaan dari cabang yang bersangkutan, tetapi datanya tidak ada ber-

hubung angka tersebut adalah merupakan kerahasiaan bank yang bersangkutan. Jadi untuk perhitungan tersebut, modal tidak bisa dimasukkan.

Akhirnya rumus LDR yang dipakai adalah:

$$\text{LDR} = \frac{\text{total kredit}}{\text{dep} + \text{tab} + \text{giro}}$$

**Tabel V - 1**  
**LDR Perbankan di Sulawesi Selatan**  
(milliar Rp)

Tahun	Total Kredit	Total Dana	LDR (%)
1983	298,98	98,760	302,73
1984	344,31	136,789	251,71
1985	385,94	201,382	191,65
1986	438,85	250,852	174,94
1987	494,08	301,776	163,72
1988	634,06	376,494	168,41
1989	892,26	585,376	152,43
1990	1.312,10	822,966	159,44
1991	1.394,01	1.225,123	113,79
1992	1.381,03	1.468,978	94,01
1993	1.587,88	1.778,763	89,27
1994	2.270,36	2.080,928	109,10
1995	2.696,54	2.499,501	107,88
1996	3.364,86	3.110,359	108,18

Sumber: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang

Pada tahun 1983, LDR perbankan sangat tinggi yaitu 302,73%, kredit yang disalurkan tiga kali lipat dari dana yang dapat dihimpun, tetapi pada tahun-tahun berikutnya, LDR mulai menurun. Pada tahun 1988 sampai tahun 1990 LDR

perbankan naik turun. Ini bukan berarti tidak ada pengaruh Pakto terhadap LDR dan tidak terjadi ekspansi kredit. Perubahan LDR yang hanya sedikit itu, dikarenakan dana yang dihimpun perbankan meningkat disertai peningkatan penyaluran kredit perbankan, yang menyebabkan perubahan naik turunnya LDR tidak terlalu besar.

Pada tahun 1991, LDR perbankan menurun secara drastis dari 159,44% menjadi 113,79%, sebagai akibat dikeluarkannya Paket Kebijakan 28 Februari 1991 yang mengharuskan LDR di bawah 110%. Namun ketentuan tersebut belum tercapai karena LDR masih di atas 110%. Pada tahun 1992 barulah perbankan dapat memenuhi ketentuan LDR yang berlaku, di mana LDR sebesar 94,01%. Ini berarti masih ada peluang 15,99% untuk ekspansi kredit.

Pada tahun 1993, LDR sebesar 89,27%, berada sedikit di atas 85%, batas terendah LDR yang ditentukan. Ekspansi kredit yang terjadi sangat kecil dan peluang untuk ekspansi kredit masih besar, yaitu masih ada peluang 20,73% untuk ekspansi kredit.

Menghadapi kenyataan menurunnya ekspansi kredit, menyebabkan pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 29 Mei 1993 untuk meningkatkan ekspansi kredit. Reaksi terhadap kebijakan tersebut, yaitu meningkatnya kembali LDR menjadi 109,10% pada tahun 1994.

Sampai pada tahun 1996, LDR perbankan mencapai 108,18%, seperti yang diumumkan oleh Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang. Jika berdasarkan



ketentuan yang ada, maka LDR masih dalam batas ketentuan yang berlaku, berarti perbankan masih dapat mengadakan ekspansi kredit. Namun dalam perhitungan yang dilakukan tidak dimasukkan unsur modal. Jika modal juga dimasukkan, maka LDR akan lebih rendah lagi.

Dapat dilihat bahwa Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang dalam melakukan perhitungan LDR, juga tidak memasukkan unsur modal menurut ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mendorong perbankan melakukan ekspansi kredit, karena dengan masuknya unsur modal dalam perhitungan tersebut, berarti pembagiannya akan semakin besar, yang akan menyebabkan hasil perhitungan menjadi kecil. Jadi jika unsur modal dimasukkan, maka masih besar peluang ekspansi kredit perbankan di Sulawesi Selatan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Deregulasi ekonomi, berupa Paket Kebijakan 1 Juni 1983 dan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 sangat berpengaruh terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan, melalui peningkatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit setelah diberlakukannya kedua paket kebijakan tersebut.
- Dengan adanya Paket Kebijakan Deregulasi 28 Februari 1991, terlihat bahwa pada tahun 1992 dan tahun 1993, ekspansi kredit agak menurun yaitu LDR tahun 1992 sebesar 94,01% dan tahun 1993 sebesar 89,27%. Kemudian untuk menggairahkan kembali perekonomian kita maka dikeluarkan Paket Kebijakan 29 Mei 1993 yang memuat ketentuan kelonggaran untuk ber-ekspansi. Oleh karena itu pada tahun 1994 LDR menjadi 109,10%. Kemudian tahun 1995 LDR sebesar 107,88% dan tahun 1996 sebesar 108,18%.
- Dengan LDR perbankan di Sulawesi Selatan sebesar 108,18% berarti LDRnya masih dalam batas yang ditentukan, sehingga perbankan masih mempunyai sedikit peluang untuk ekspansi kredit besar, karena perbankan membatasi pertumbuhannya. Dengan demikian hipotesis yang telah dikemukakan, yaitu:

jika ditinjau dari sisi LDR, maka diduga masih besar peluang perbankan di Sulawesi Selatan untuk ekspansi kredit, ternyata dapat diterima. Namun tidak berarti pihak perbankan dapat menyalurkan kredit terlalu ekspansif karena angka LDR tahun 1996 yaitu 108,18%, sudah hampir mendekati batas ketentuan yang berlaku yang harus dilakukan adalah tetap berdasarkan pada prinsip selektif dan prudential banking.

## 6.2. Saran-saran

Dari hasil analisis pembahasan dan kesimpulan yang telah ditarik, maka disarankan:

- Otoritas moneter dalam memberikan kebijaksanaan kepada perbankan, hendaknya kebijaksanaan tersebut dapat juga dimanfaatkan oleh perbankan di daerah, seperti halnya dalam perhitungan LDR, di mana pengertian deposito diperluas tidak hanya mencakup dana pihak ketiga, tetapi juga modal sendiri.
- Untuk saat ini masih ada kredit macet yang belum terselesaikan yang dapat menghambat ekspansi kredit, hendaknya pihak perbankan menyelesaikan dahulu masalah kredit macetnya agar dapat mengadakan ekspansi kredit lagi.
- Untuk penyaluran kredit perbankan sebaiknya lebih diarahkan kepada kredit modal kerja yang padat karya guna menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya atau dengan kata lain kredit modal kerja harus diperbesar dan kredit konsumsi lebih diperkecil.
- Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi penulisan selanjutnya diharapkan

dalam perhitungan LDR unsur modal dapat dimasukkan sehingga angka LDR yang didapatkan menjadi lebih kecil. Dengan demikian maka peluang untuk ekspansi kredit perbankan menjadi lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 1996, Perkembangan Ekonomi-Kuangan Daerah Tahun 1995/1996, Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang
- Bank Indonesia, Statistik Ekonomi-Kuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Berbagai Edisi, Ujung Pandang: Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang.
- Biro Pusat Statistik, 1996, Indikator Ekonomi, Ujung Pandang: Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan.
- Hadiwidjaya, H. dan R.A. Rivai Wirasasmita, 1991, Analisis Kredit, Bandung: Pionir Jaya.
- Harun, Muchlis, Tinjauan Perkembangan Ekonomi Indonesia Triwulan Kedua 1993, Tinjauan Ekonomi Bank Negara Indonesia 1946 No. 162 (juni) 1993.
- Insukindro, 1993, Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia, Yogyakarta: BPFE - UGM.
- Kwik Kian Gie, 1995, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama & STIE-IBII.
- M., Romatio, 1992, Pertumbuhan GNP dan Ekspansi Kredit Tak Sejalan, Info Finansial 27/III/229 April 1992.
- Nasution, Anwar, 1990, Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indone-sia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nopirin, 1992, Ekonomi Moneter, Buku I, Edisi ke-4, Yogya-karta: BPFE.
- Sinungan, Muchdarsyah, 1993, Manajemen Dana Bank, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sjahrir, 1990, Analisis Ekonomi Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suyatno, Thomas, dkk., 1993, Dasar-dasar Perkreditan, Ja-karta: PT Gramedia Pustaka UTama.

Suyatno, Thomas, dkk., 1994, Kelembagaan Perbankan, Jakar-ta: PT Gramedia Pustaka UTama.